

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Wilayah Kota Semarang

Kota Semarang merupakan salah satu Ibukota Provinsi yang ada di Indonesia. Kota Semarang memiliki daya tariknya tersendiri dari berbagai unsur, seperti pariwisata, investasi, perindustrian, dan sebagainya. Sebagai salah satu perwujudan dari kota metropolitan yang merupakan julukan bagi kota yang mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintahnya sebagai wujud atas pemenuhan kebutuhan dari masyarakatnya yang kompleks, Kota Semarang telah mengalami perkembangan yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya di sekitarnya. Pembangunan yang sangat digalakkan oleh pemerintah kota telah cukup terlihat dan dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Semarang dalam berbagai aspek, seperti kemudahan dalam mengakses berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan transportasi dan layanan lainnya yang diperuntukkan sebagai pelayanan publik.

Kota Semarang selama ini menjadi pusat bagi kehidupan bagi wilayah sekitarnya, seperti salah satunya adalah adanya persebaran kawasan industri yang telah berkembang lama menyebabkan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat baik bagi masyarakat Kota Semarang, maupun di sekitarnya. Kawasan industri tersebut memiliki dampak bagi beberapa pihak, seperti para investor yang mendapatkan lahan guna

membangun industri; kemudian pemerintah sendiri memiliki pendapatan daerah dari sektor industri serta masyarakat yang memiliki lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja yang lebih baik.

2.1.1 Kondisi Fisik Wilayah

- Kondisi Geografis

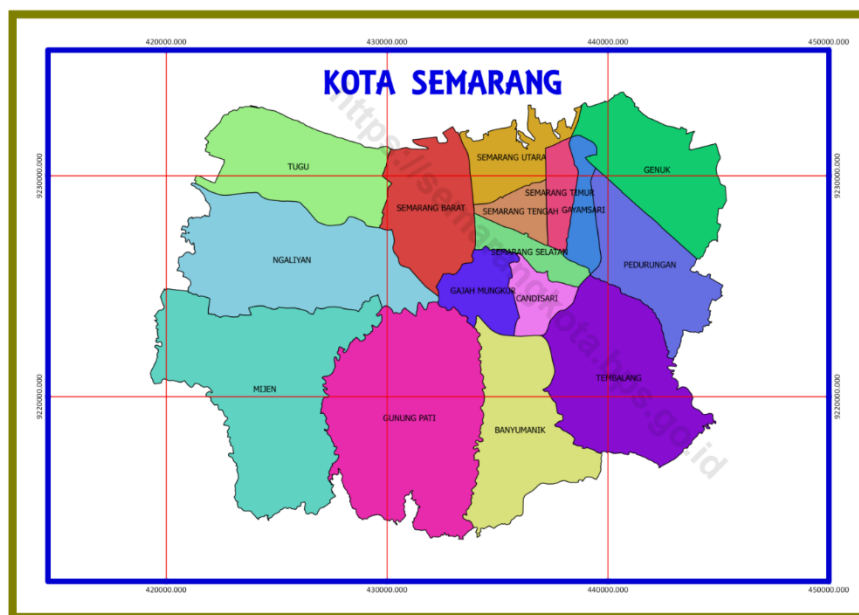
Kota Semarang sendiri terbentang antara sejauh $6^{\circ} 50' "$ LS dan $7^{\circ} 10' "$ LS; $109^{\circ} 50' "$ BT dan $110^{\circ} 35' "$ BT dengan keterangan batas utara Kota Semarang adalah Laut Jawa, kemudian terdapat Kabupaten Semarang pada sisi selatan, sisi barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal dan sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Demak (Badan Pusat Statistik, 2020). Dengan kondisi geografis tersebut, menjadikan Kota Semarang menjadi kota yang memiliki daya tarik bagi wilayah di sekitarnya dalam beberapa aspek, salah satunya sebagai tujuan untuk peraduan nasib untuk mencari pekerjaan yang lebih layak.

Kondisi wilayahnya Kota Semarang terbagi kedalam 2 kondisi utama berdasarkan keadaan lingkungan di sekitarnya yaitu Wilayah Semarang Atas, yang mana merupakan wilayah Kota Semarang yang memiliki vegetasi serta keadaan lingkungannya yang lebih asri dan sejuk. Hal tersebut terjadi karena letak wilayahnya yang berada di sekitar wilayah pegunungan dan dataran tinggi lainnya. Sedangkan, yang kedua adalah Wilayah Semarang Bawah yang merupakan wilayah yang kondisi serta vegetasinya cenderung

rendah. Hal tersebut karena wilayah tersebut berdekatan dengan wilayah pesisir di Kota Semarang.

Gambar 2.1

Peta Wilayah Kota Semarang Menurut Kecamatan



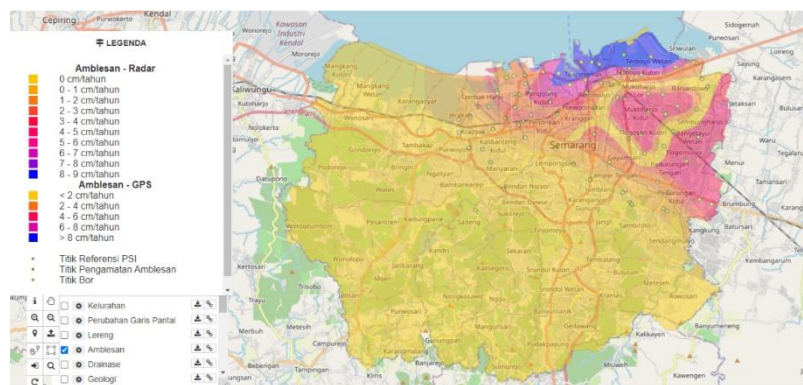
Sumber : Dokumen Kota Semarang Dalam Angka 2020

Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap struktur batuan dan tanah yang ada di wilayah Kota Semarang. Semarang Bawah yang merupakan wilayah pesisir dan dataran rendah cenderung memiliki struktur tanah yang labil dan sering mengalami penurunan. Hal ini karena adanya fenomena alam abrasi yang terjadi di beberapa titik dan padatnya aktivitas yang berada diatas lapisan tanah tersebut yang menyebabkan daya tampung dan daya dukung yang dimiliki oleh lingkungan seakan semakin menurun. Berdasarkan data yang

diperoleh dari Dinas Penataan Ruang Kota Semarang menyatakan bahwa dari seluruh wilayah Kota Semarang, tingkat penurunan atau amblesan tanah tertinggi berada di wilayah Semarang Utara, dengan intensitas 8 – 9 cm dalam satu tahun.

Gambar 2.2

Peta Penurunan Muka Tanah Kota Semarang



Sumber : Distaru Kota Semarang, 2020 (<https://bit.ly/3s8Qxcp> diakses 4 Oktober 2021)

Wilayah Kota Semarang secara administratif terbagi dalam 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan (Badan Pusat Statistik, 2020). Setiap wilayah tersebut memiliki keunikan serta karakteristik masyarakatnya yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hal ini karena berbagai faktor, salah satunya adalah kondisi geografis wilayah. Sehingga, dalam melaksanakan pembangunan daerah, perlu mengamati berbagai aspek pada lokasi atau sasaran

pembangunan tersebut sehingga pembangunan tersebut dapat memiliki manfaat bagi kesejahteraan seluruh pihak.

- Demografis

Kehidupan suatu wilayah tidak akan berjalan apabila tidak ada yang menjadi subjek dan objeknya. Dalam hal ini maka dibutuhkan peran dari manusia sebagai penggerak kehidupan suatu daerah. Manusia sebagai makhluk yang berakal dan memiliki pikiran diharuskan untuk selalu bergerak dan berkembang kearah yang lebih baik guna mempersiapkan diri menghadapi permasalahan yang mereka alami. Disisi lain, manusia juga sebagai makhluk sosial yang tidak bisa menjalankan kehidupan maupun perkembangan di suatu daerah tanpa bantuan dari manusia lainnya. Manusia dalam melakukan pengembangan pada suatu wilayah dengan bekerja sama dengan manusia lain yang menjalin hubungan baik dalam suatu kelompok masyarakat.

Setiap tatanan kelompok masyarakat juga memerlukan beberapa kelompok masyarakat lainnya yang dianggap lebih ditinggikan sebagai kelompok yang berwenang dalam memberikan berbagai pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat di bawahnya. Sehingga, pemerintah birokrat merupakan cerminan dari kelompok masyarakat yang mendapatkan kepercayaan publik dalam memberikan serta melaksanakan pembangunan di suatu wilayah berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang

dilakukan Pemerintah Pusat yang tengah berada pada fase percepatan pembangunan nasional. Hal ini karena menyesuaikan dengan visi dan misi dari Presiden yang tercantum dalam Nawacita yang salah satu poinnya adalah dengan memperketat serta melakukan percepatan proyek pembangunan strategis nasional, seperti sarana mobilitas jalan, pelabuhan, bandara, dan sebagainya. Hal tersebut membuat setiap Pemerintah Daerah juga melakukan berbagai upaya yang dapat membantu pencapaian tujuan nasional yang telah ada.

Kota Semarang yang menjadi tujuan dari berbagai kalangan untuk mengadu nasib di Ibukota Provinsi Jawa Tengah menyebabkan pertumbuhan masyarakat Kota Semarang mengalami kenaikan yang cukup besar. Seperti data yang tertera dalam Tabel 2.1 dibawah ini yang menggambarkan secara rinci adanya perubahan yang cenderung mengalami pertambahan di setiap wilayah di Kota Semarang, terutama pada daerah yang memiliki lapangan pekerjaan yang cukup besar dan beragam.

Tabel 2.1**Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Kecamatan****Tahun 2014 – 2020**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mijen	59.425	61.405	69.789	70.889	74.864	76.037	80.906
Gunung Pati	77.308	78.641	109.445	88.746	116.928	118.760	98.023
Banyumanik	131.404	132.508	155.994	146.732	162.408	164.953	142.076
Gajah Mungkur	63.660	63.707	59.960	69.510	59.743	60.679	56.232
Semarang Selatan	79.952	79.620	69.684	85.456	69.433	70.522	62.030
Candisari	79.646	79.258	75.946	85.652	75.671	76.857	75.456
Tembalang	154.697	156.868	194.231	175.732	206.271	209.504	189.680
Pedurungan	178.499	180.282	203.866	199.153	211.376	214.689	193.151
Genuk	95.218	97.545	110.786	110.556	117.174	119.010	123.310
Gayamsari	73.850	74.178	79.396	80.751	81.755	83.036	70.261
Semarang Timur	78.019	77.331	74.861	82.867	74.592	75.762	66.302
Semarang Utara	128.134	127.752	118.158	137.776	117.801	119.647	117.605
Semarang Tengah	70.727	70.179	60.375	74.954	60.158	61.102	55.064
Semarang Barat	158.510	158.131	161.054	171.315	162.501	165.048	148.879
Tugu	31.592	31.954	32.041	35.023	32.818	33.333	32.822
Ngaliyan	124.195	125.828	153.844	137.980	162.622	165.171	141.727
Jumlah	1.584.836	1.595.187	1.729.430	1.753.092	1.786.115	1.814.110	1.653.524

Sumber : Olah Data BPS Kota Semarang, 2021(<https://bit.ly/3scRIHH> diakses 3 Oktober 2021)

Tingginya jumlah penduduk di Kota Semarang merupakan cerminan dari pembangunan daerah yang berhasil. Hal tersebut karena pertumbuhan penduduk akan berkaitan dengan penanganan di bidang kesehatan yang telah mencukupi, sehingga apabila pembangunan daerah di bidang kesehatan telah maksimal maka pelayanan umum di bidang kesehatan akan semakin meningkat yang akan meningkatkan pertumbuhan penduduk. Tidak hanya faktor kesehatan, namun penambahan penduduk di Kota Semarang juga

dipengaruhi oleh faktor lain, salah satunya adalah Kota Semarang yang menjadi pusat perekonomian bagi wilayah sekitarnya. Kota Semarang memiliki iklim perekonomian yang terhitung menjanjikan dan hal tersebut karena selain sebagai Ibukota Provinsi dan berstatus sebagai kota metropolitan Kota Semarang juga dilalui oleh jalur Pantura yang merupakan jalur perekonomian di Pulau Jawa.

Potensi yang dimiliki oleh Kota Semarang telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat baik di Kota Semarang maupun wilayah yang berada di sekitarnya berusaha mencari keberuntungan dengan mencari pekerjaan yang lebih layak bila dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya di wilayah asalnya. Minat masyarakat yang semakin tinggi akan memunculkan persoalan baru di Kota Semarang, yaitu permasalahan tingginya angka kepadatan penduduk di Kota Semarang. Angka Kepadatan Penduduk merupakan skala yang menggambarkan jumlah penduduk yang mendiami atau bermukim dalam satu wilayah tertentu. Maka dari itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang yang telah melakukan pengukuran Kepadatan Penduduk di Kota Semarang yang memiliki luas kurang lebih 373,7 Km² (2020) seperti yang telah tersaji dalam Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Kepadatan Penduduk Kota Semarang Menurut Kecamatan
Tahun 2014 – 2020

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mijen	983	1.066,99	1.101	1.213	1.301	1.321	1.406
Gunung Pati	1.387	1.453,35	1.478	2.023	2.161	2.195	1.812
Banyumanik	4.991	5.157,96	5.196	6.072	6.322	6.421	5.530
Gajah Mungkur	6.993	7.023,93	7.030	6.611	6.587	6.690	6.200
Semarang Selatan	13.990	13.431,17	13.354	11.755	11.713	11.896	10.464
Candisari	12.217	12.118,96	12.059	11.613	11.570	11.752	11.538
Tembalang	3.234	3.549,05	3.599	4.394	4.667	4.740	4.291
Pedurungan	8.483	8.700,87	8.766	9.839	10.202	10.361	9.322
Genuk	3.342	3.561,34	3.633	4.045	4.278	4.345	4.502
Gayamsari	11.913	12.008,74	12.000	12.853	13.235	13.443	11.375
Semarang Timur	10.245	10.042,99	9.949	9.722	9.687	9.839	8.611
Semarang Utara	11.661	11.645,58	11.589	10.771	10.738	10.907	10.721
Semarang Tengah	11.673	11.429,80	11.353	9.833	9.798	9.951	8.968
Semarang Barat	7.313	7.273,74	7.247	7.408	7.475	7.592	6.848
Tugu	972	1.005,48	1.008	1.008	1.033	1.049	1.033
Ngaliyan	3.183	3.312,13	3.336	4.050	4.281	4.348	3.731

Sumber : Olah Data BPS Kota Semarang, 2021(<https://bit.ly/3CINcWn> diakses 3 Oktober 2021)

Melihat kondisi diatas, diketahui populasi di Kota Semarang baik yang berstatus sebagai penduduk atau bukan penduduk menunjukkan bahwa kondisi tersebut juga mencerminkan bagaimana keberagaman kultur masyarakat yang mana dengan banyaknya penduduk di setiap wilayah di Kota Semarang akan memunculkan keberagaman kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat di Kota Semarang. Berdasarkan usia, masyarakat dikategorikan kedalam 2 hal, yaitu kelompok masyarakat usia produktif yaitu kelompok masyarakat yang berada pada rentan usia 15 – 65 tahun,

dan kelompok usia tidak produktif yaitu kelompok masyarakat yang berada pada rentang usia dibawah 15 tahun maupun pada usia lebih dari 65 tahun. Dalam dokumen Kota Semarang dalam Angka 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020) menerangkan bahwa jumlah angkatan kerja di Kota Semarang pada tahun 2019 sebesar 951.135 jiwa yang mana jabaran kegiatan dalam angkatan kerja di Kota Semarang dapat diamati pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas Menurut Status Pekerjaan Utama Selama Seminggu yang Lalu di Kota Semarang Tahun 2019

Status Pekerjaan Utama	Jumlah (jiwa)
Berusaha Sendiri	144.816
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap / Buruh Tidak dibayar	66.551
Berusaha dibantu Buruh Tetap / Buruh dibayar	28.674
Buruh / Karyawan / Pegawai	599.605
Pekerja Bebas	32.620
Pekerja Keluarga / Tak dibayar	35.671
Jumlah	907.937

Sumber : Olah Dokumen Kota Semarang Dalam Angka 2020, 2021

Tabel 2.3 dapat diketahui bagaimana intensitas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Semarang adalah kegiatan sebagai Buruh/Karyawan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kota Semarang mayoritas didukung pada sektor industri yang berkembang pesat serta akses mobilitas yang ramai dengan adanya

jalur Pantura akan mampu menjadi pendapatan daerah yang akan digunakan untuk pembangunan daerah pada berbagai sektor yang mana hal tersebut juga akan kembali diperuntukkan guna kesejahteraan masyarakat sebagai pencapaian dari tujuan nasional.

2.1.2 Kondisi Wilayah Pesisir Kota Semarang

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang memiliki karakteristik lebih khusus dibandingkan dengan wilayah lainnya, terutama kaitannya dengan pemanfaatan wilayah yang ada di atasnya. Kota Semarang sendiri menjadi salah satu kota yang memiliki wilayah pesisir yang terhitung sangat potensial. Hal tersebut karena wilayah pesisir Kota Semarang dilalui oleh jalur Pantura yang menghubungkan antara wilayah barat dan wilayah timur Pulau Jawa. Jalur Pantura tersebut juga menyebabkan wilayah pesisir Kota Semarang menjadi wilayah pusat perindustrian terbesar dan terpadat. Kawasan tersebut telah menjadi pusat dari berbagai aktivitas industri besar berdiri dan berkembang. Jenis industri yang ada juga beraneka ragam, seperti di bidang ekspedisi, permesinan, produk makanan ataupun minuman dan berbagai jenis industri lainnya.

Fenomena tersebut menyimpulkan bahwa sebagai kota yang berfokus dalam pengembangan iklim investasi Kota Semarang berusaha untuk memperbaiki serta membentuk sistem yang terintegrasi antara pemerintah dan pihak swasta sehingga dunia industri di Kota Semarang semakin baik dan mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi

masyarakat sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki oleh Kota Semarang dan sekitarnya. Kawasan Kaligawe menjadi salah satu kawasan industri di Kota Semarang yang memiliki beberapa keunikan serta permasalahan yang telah terjadi sejak lama. Hal tersebut juga berkaitan dengan kawasan tersebut yang terletak pada wilayah pesisir di Kota Semarang.

2.2 Identifikasi Masalah Pesisir di Kota Semarang

Segala sesuatu yang memiliki potensi atau suatu hal yang memiliki keunggulan tidak akan terlepas dari masalah – masalah yang dihadapi. Permasalahan – permasalahan tersebut apabila tidak mendapatkan perhatian akan menimbulkan permasalahan lainnya yang akan melibatkan banyak pihak. Kaitannya dengan kondisi Kota Semarang serta potensi yang sebelumnya telah dijelaskan sebelumnya, Kota Semarang juga memiliki beberapa permasalahan yang hingga saat ini masih terjadi, khususnya pada wilayah pesisir di Kota Semarang. Hal tersebut telah menjadi keluhan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar yang bermukim maupun masyarakat lainnya yang beraktivitas di lingkungan tersebut. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Permasalahan Banjir Rob

Wilayah Kota Semarang terbagi kedalam berbagai wilayah, dari wilayah pesisir hingga dataran tinggi. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang berpotensi memiliki kerentanan akan aktivitas alam. Salah satu fenomena yang sering terjadi pada wilayah pesisir Kota Semarang adalah

fenomena Banjir Rob. Banjir Rob merupakan istilah yang menggambarkan naiknya permukaan air laut yang kemudian memasuki wilayah pemukiman penduduk. Wilayah utara Kota Semarang menjadi salah satu titik terjadinya fenomena tersebut. Salah satu faktor utama yang menyebabkan permasalahan banjir rob di Kota Semarang adalah tingginya amblesan atau penurunan muka tanah yang terjadi di wilayah utara Kota Semarang. Hal tersebut juga didukung dengan faktor lainnya, seperti sistem drainase yang tidak optimal dan lain sebagainya.

Fenomena Banjir Rob merupakan permasalahan di Kota Semarang dikarenakan telah memberikan beberapa dampak, antara lain :

- Menimbulkan kerusakan fasilitas publik, terutama adalah kerusakan jalan Pantura yang berada pada Kawasan Kaligawe;
- Permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan tidak optimalnya sistem drainase sehingga menimbulkan genangan air yang dapat menjadi pemicu munculnya berbagai penyakit.
- Kemacetan Jalan Pantura ketika banjir rob disebabkan karena banyaknya kendaraan terutama sepeda motor yang mengalami kerusakan saat melalui banjir sehingga terjadi penumpukan laju kendaraan di Jalan Pantura.

b. Kemacetan Pantura

Kemacetan lalu lintas sudah menjadi persoalan yang umum dan sering terjadi pada beberapa kota besar, begitu juga dengan Kota Semarang. Jalur Pantura yang merupakan jalur lintas provinsi sudah sewajarnya akan dipadati aktivitas penduduk yang berada di sekitarnya, seperti kegiatan pendidikan, kegiatan berbagai pekerjaan dan aktivitas lainnya. Jalur Pantura di Kota Semarang dapat dikatakan sebagai salah satu wilayah dengan kejadian kemacetan yang cukup sering bila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal tersebut karena beberapa faktor, salah satunya dengan adanya fenomena Banjir Rob yang terjadi secara tiba – tiba. Apabila kemacetan di Jalur Pantura Kota Semarang terus menerus terjadi, hal tersebut akan berdampak pada lambatnya mobilitas perekonomian dan aktivitas masyarakat sekitar dan akan memberikan dampak yang lebih besar di kemudian hari.

2.3 Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak

Permasalahan yang dialami oleh Kota Semarang seperti persoalan Banjir Rob dan Kemacetan pada Jalur Pantura bukan menjadi permasalahan yang dibiarkan saja oleh pemerintah. Hal tersebut karena Pemerintah Kota Semarang selalu melakukan berbagai upaya dalam mengatasi persoalan tersebut, seperti penyediaan pompa air di beberapa titik yang sering terdampak Banjir Rob serta perbaikan dan peninggian Jalur Pantura. Namun, sejauh ini solusi tersebut hanya berlaku dalam jangka pendek saja. Sehingga, Pemerintah pusat melalui Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan alternatif kebijakan dalam mengatasi persoalan di Kota Semarang tersebut yaitu dengan adanya Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak.

Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak merupakan salah satu gagasan pemerintah pusat sebagai bentuk pembangunan strategis nasional yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden No. 58 tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dilansir dari Kompas.com edisi 20 April 2021 (<https://bit.ly/3yIcEZC>) menerangkan bahwa proyek Jalan Tol Semarang – Demak merupakan rancangan jalan tol yang menghubungkan wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Demak dengan panjang kurang lebih 27 Km dengan pembagian dalam 2 seksi, yaitu Seksi 1 yang berada pada wilayah Kota Semarang – Kab. Demak sepanjang 10,69 Km. dan Seksi 2 yang ada di Kabupaten Demak dengan panjang 16,31 Km. Pelaksanaan dari pembangunan jalan tol ini juga terdapat pembagian kewenangan. Seksi 1 merupakan kewenangan dari Pemerintah sedangkan untuk Seksi 2 merupakan kewenangan dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT. Pembangunan Perumahan Semarang – Demak (<https://bit.ly/2VT2HKc>).

Gambar 2.3**Potret Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak**

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak merupakan salah satu solusi yang diperkirakan dapat mengatasi persoalan Banjir Rob dan Kemacetan di Panjuta Kota Semarang hingga Kabupaten Demak. Hal tersebut telah tertera dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 590/38 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 590/52 tahun 2016 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak telah dijabarkan bahwa Proyek Jalan Tol Semarang – Demak merupakan proyek jalan tol yang dibangun dengan 2 tujuan utama, yaitu :

- a. Meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan pada kawasan utara Jawa; dan

- b. Menanggulangi Banjir Rob dan abrasi di pesisir Kota Semarang dan Kabupaten Demak bagian barat.

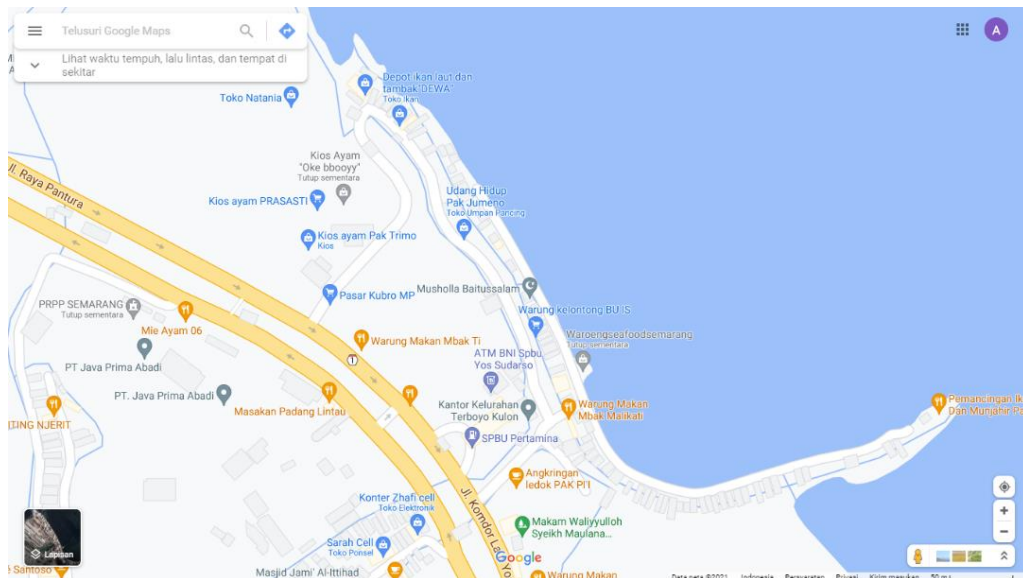
Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak merupakan suatu bentuk inovasi yang diberikan oleh pemerintah atas penanganan permasalahan yang terjadi di Jalur Pantura yang berada di Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Hal tersebut dilansir dalam Bisnis.com edisi 18 Februari 2021 (<https://bit.ly/3yI8wgc> diakses 13 Agustus 2022) yang menerangkan bahwa selain berfungsi sebagai jalur transportasi, Jalan Tol Semarang – Demak juga dijadikan sebagai tanggul laut yang berfungsi untuk menahan air laut yang akan memasuki kawasan permukiman dan Jalur Pantura. Inovasi tersebut dapat terjadi karena lokasi pembangunan jalan tol tersebut melintasi wilayah laut dan akan menjadi salah satu jalan tol laut di Pulau Jawa.

Pelaksanaan atas pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak telah berlangsung sejak bulan Maret 2018 dan dilansir dari Kompas.com edisi 20 April 2021 (<https://bit.ly/3yIcEZC> diakses 13 Agustus 2021) menerangkan bahwa pelaksanaan proyek tersebut hingga tanggal 15 Maret 2021 telah mencapai 33,91% untuk tahap pengadaan lahan dan 22,54% untuk tahap konstruksi. Kemudian, untuk pengopersian jalan tol ini akan ditargetkan dapat berlangsung pada tahun 2024 mendatang dengan harapan bahwa tujuan dan manfaat dari pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat secara khusus maupun masyarakat di Pulau Jawa pada umumnya.

2.4 Kondisi Wilayah Lokasi Penelitian

2.4.1 Kelurahan Terboyo Kulon

Informasi mengenai Kelurahan Terboyo Kulon yang dapat diakses melalui website resmi (<https://terboyokulon.semarangkota.go.id/> diakses 4 Oktober 2020) telah menerangkan bahwa Kelurahan Terboyo Kulon merupakan salah satu wilayah di bagian utara Kota Semarang yang mana wilayah Kelurahan Terboyo Kulon yang memiliki luas wilayah 197,501 Ha tersebut merupakan salah satu wilayah di Kota Semarang yang berbatasan langsung dengan laut. Kelurahan Terboyo Kulon yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 616 jiwa yang mana mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh atau pekerja. Melihat letak geografis dari Kelurahan Terboyo Kulon sendiri yang berbatasan langsung dengan wilayah laut (Laut Jawa) menyebabkan kondisi pemukiman penduduk disana yang rawan dengan terjadinya berbagai fenomena alam yang berkaitan dengan wilayah pesisir, seperti abrasi dan pasang surut air laut.

Gambar 2.4**Peta Wilayah Kelurahan Terboyo Kulon**

Sumber : <https://www.google.com/maps> diakses 4 Oktober 2021)

2.5 Profil Instansi Terkait

2.5.1 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bernaung pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 61 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Secara umum, Disperakim Provinsi Jawa Tengah membawahi dua urusan, yaitu urusan perumahan rakyat dan kawasan

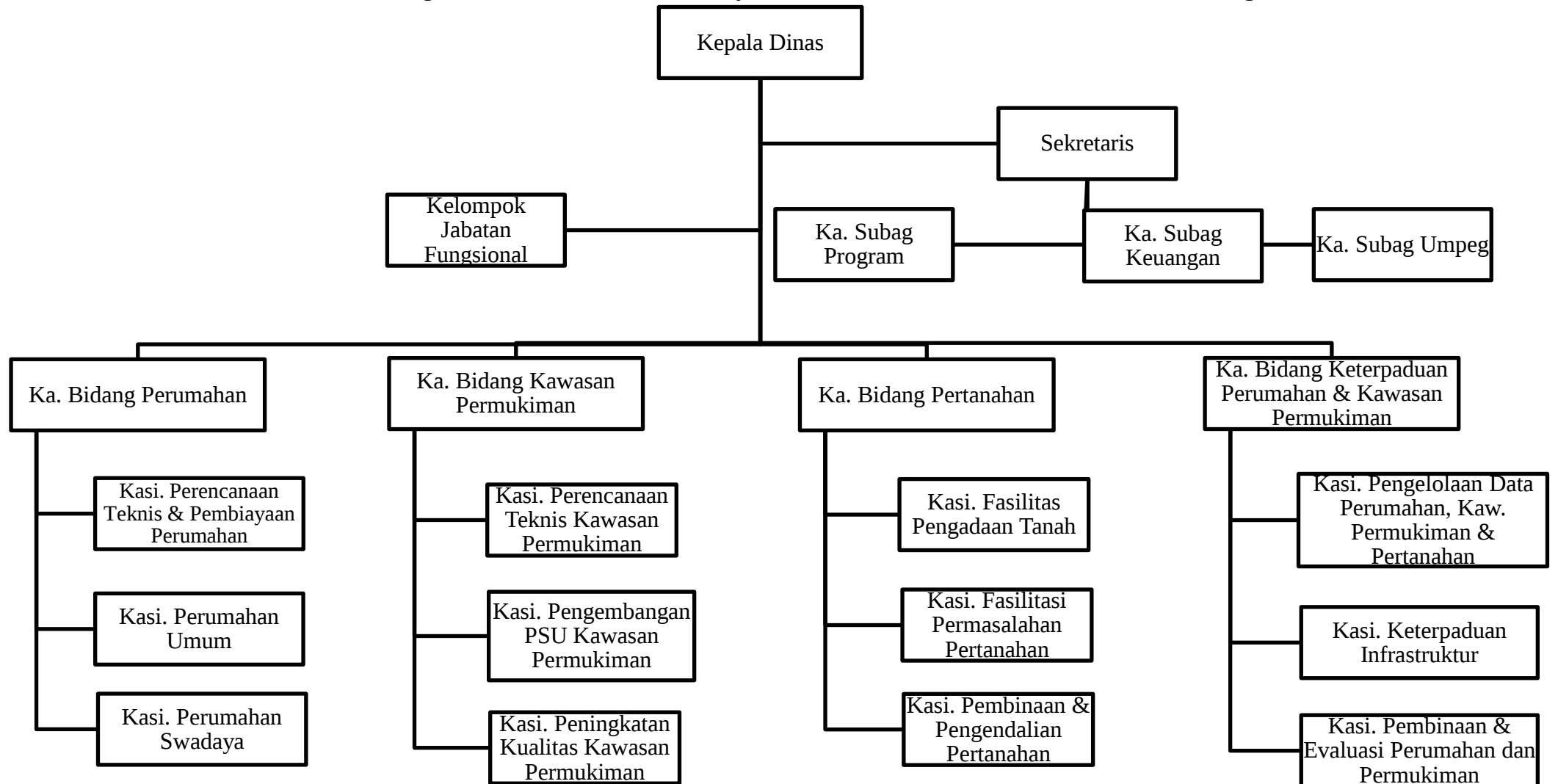
permukiman serta urusan pertanahan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dengan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka dari itu Disperakim Provinsi Jawa Tengah bertugas untuk membantu kepada daerah untuk mencapai Visi serta Misi kepada daerah yang berkaitan dengan urusan Perumahan Rakyat, Permukiman serta Pertanahan. Disperakim Provinsi Jawa Tengah memiliki tiga tujuan utama (<http://disperakim.jatengprov.go.id/>), yaitu :

- Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas;
- Meningkatkan kapasitas hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum; dan
- Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

Kaitannya dengan topik pembahasan dalam tulisan ini adalah, dalam hal proses pelaksanaan dari kebijakan pengadaan lahan pembangunan jalan tol Semarang – Demak Disperakim Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas sebagai pelaksana yang berkaitan dengan pembagian serta pendataan tanah dari masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak.

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Olah Data Disperakim Provinsi Jawa Tengah, 2020(<https://bit.ly/3lZPrP2>)

2.5.2 Tim Persiapan Pengadaan Lahan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

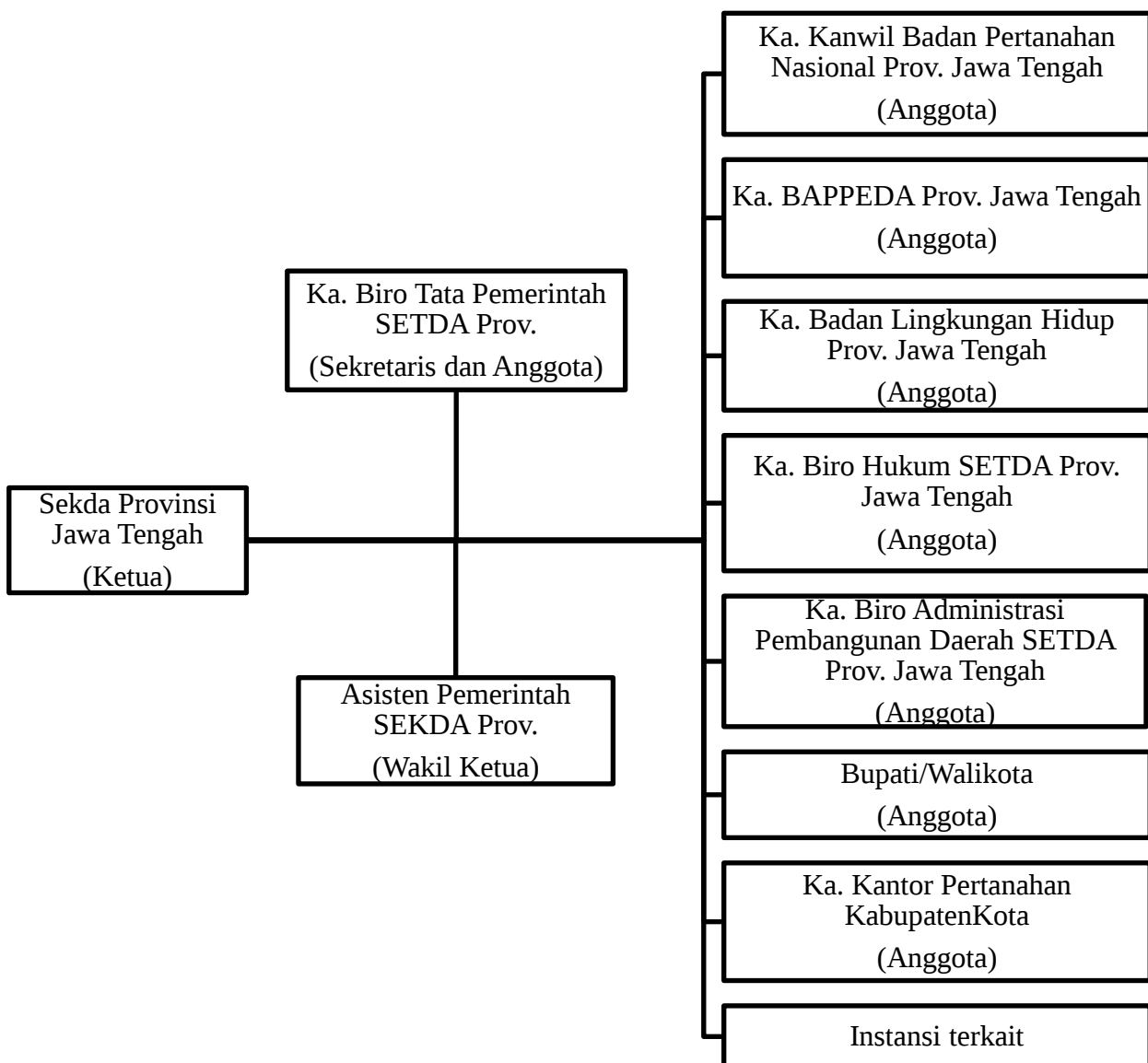
Kebijakan pembangunan infrastruktur yang mana dalam prosesnya melalui beberapa tahap dan pada setiap tahapnya pasti akan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak yang dapat memberikan informasi serta pelaksanaan teknis dari setiap proses tersebut. Salah satu tahapan dari pembangunan infrastruktur yaitu adalah pengadaan lahan. Dalam Undang – undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah disebutkan bagaimana hal – hal yang berkaitan dengan pengadaan tanah guna pembangunan umum telah dijelaskan serta patut untuk dipatuhi dalam setiap tahapannya.

Kemudian, setiap daerah di Indonesia yang diketahui memiliki karakteristik pemerintahan yang beragam memerlukan aturan teknis terkait pelaksanaan atas suatu program ataupun kegiatan yang bersifat tetap, salah satunya adalah dalam proses pengadaan lahan dalam pembangunan untuk kepentingan umum. Seperti halnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mana telah membentuk Peraturan Gubernur No. 18 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mana dalam peraturan tersebut telah dijelaskan secara rinci mengenai alur pelaksanaan, aktor yang terlibat serta jangka waktu dari setiap tahapan dari proses pengadaan lahan pembangunan

di lingkup Jawa Tengah. Tim Persiapan Pengadaan Lahan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut dapat digambarkan dalam bagan 2.2 berikut :

Bagan 2.2

Struktur Tim Persiapan Pengadaan Tanah



Sumber : Olah Dokumen Pergub No. 18 tahun 2013, 2020